

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang mempunyai fungsi serta kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera perlu adanya kontribusi dari Lembaga Polri¹. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 4, dapat diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yaitu dengan mengayomi, melayani, melindungi, dan menegakkan hukum demi mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bangsa dan bernegara².

Melihat dari fungsinya, polisi di tuntut untuk memiliki sikap tegas, adil, ramah, dan jujur dalam menjalankan tugasnya, dimana tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban³. Maka dari itu, untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugasnya sikap professional seorang anggota Polri sangat diperlukan, melihat sebagai alat negara Polisi bertanggung jawab memberikan rasa nyaman dan aman yang merupakan bagian dari tugas pemerintahan sehari-hari.

¹ Gaussyah, M. 2014. *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan. Hal 2

² Bambang Poenomo. 1992. *Pembangunan Hukum dan Persfektif Ketertiban Sosial*. Yogyakarta: Penerbit UII Pres. Hal 173

³ Konar Zuber. *Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum*. Volume 15, No.3. September 2017. Hal 383

Kunanto (1997)⁴ mengatakan bahwa Polisi sebagai alat negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Polisi harus bertindak secara professional dan tegas, berpegang pada prinsip bahwa hukum diatas segala-galanya. Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban, Polri harus menjadikan profesinya sebagai panutan di masyarakat untuk menaati hukum dengan mengikutsertakan semua masyarakat sebagai bagian dari unsur keamanan itu sendiri.

Namun, masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap Polri akibat banyaknya masalah yang mencoreng nama baik lembaga ini. Kepemimpinan dan keteladanan yang buruk telah mengakibatkan banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota Polri sendiri. Makna Presisi seolah tidak ada nilainya akibat munculnya krisis kepercayaan terhadap kepolisian. Hal ini tercermin dari sikapnya yang kurang tegas dan terkesan lamban dalam pengambilan keputusan sebelum adanya perintah atasannya. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh birokrasi dan hierarki terhadap aspek pembinaan.

Berikut merupakan contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu adanya kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Komisarisi Polisi (Kopol) berinisial UN yang dikabarkan sedang menjabat sebagai Wakapolres Aru, Maluku. Saat penangkapan tim Polda Maluku berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 ons sabu dan 1 alat isap sabu.

⁴ Kunanto. 1997. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal. Hal. 36

Penangkapan tersebut diketuai oleh Kasubdit II Dires Narkoba Polda Maluku, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Jhon Oniklaita, pada Sabtu 23 Mei 2015⁵

Kasus kedua yang menyeret Lembaga Kepolisian Indonesia adalah kasus Inspektur Jenderal Napoleon Bonarparte Polisi telah menduga Napoleon melakukan tindak pidana pencucian uang (TTPU) dalam kasus red notice Djoko Tjandra. Selain itu, Napoleon juga terlibat kasus penganiayaan terhadap seorang youtuber bernama Muhammad Kasman. Polisi menyatakan bahwa Napoleon melakukan penganiayaan kepada Kasman dengan cara memukul dan melempar kotoran manusia saat keduanya sama-sama ditahan dalam Rutan Bareskrim Polri dengan kasus yang berbeda⁶.

Berdasarkan kasus tersebut, sangat memprihatinkan melihat apa yang terjadi dalam lembaga Polri saat ini. Polri yang semestinya dapat mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta memberi contoh yang baik bagi masyarakat justru menjadi salah satu pelaku dalam melakukan tindakan kriminalitas. Hal ini harus menjadi teguran dan koreksi bagi lembaga Polri untuk memperbaiki citranya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Bercermin dari permasalahan-permasalahan tersebut, jika dilihat dari kaca mata sejarah bahwasannya Indonesia pernah memiliki seorang tokoh yang bisa di jadikan teladan yang baik bagi Polri saat ini. Tokoh tersebut

⁵ Eviandro W, dan Erwin Ubwarin. *Analisis Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)*. Jurnal Belo. Volume 7. No.2 Desember 2021. Hal 182

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/17132911/tiga-kasus-yang-menjerat-irjen-napoleon-bonarparte> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

merupakan seseorang yang sangat menjunjung tinggi keadilan, kesederhanaan, serta kejujuran pada masanya yang saat ini sangat sulit ditemukan di kalangan masyarakat khususnya pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Indonesia ke-3 yaitu Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng⁷.

Jenderal Hoegeng Iman Santoso merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke-5 yang menjabat pada saat Indonesia mengalami transisi dari masa orde lama ke masa orde baru. Hoegeng dilantik sebagai Panglima Angkatan Kepolisian atau sekarang yang disebut Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 1968 bersama wakilnya Tengku Azis di Mabak Kebayoran Baru dengan Inspektur Upacara Jenderal Soeharto⁸.

Berada dipucuk pimpinan Kepolisian, Jenderal Hoegeng berupaya menjalankan tugasnya dengan totalitas, karena pada dasarnya seorang polisi adalah pelayan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum setiap saat dimana pun polisi berada. Pandangan tersebut Hoegeng dapatkan saat ia masih belajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, bahwa kehadiran seorang atau sejumlah polisi justru mendatangkan rasa tenteram pada masyarakat bukan rasa takut, sebab polisi bukanlah momok bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Hoegeng menerapkan dua citra yang harus ditegakkan yaitu yang pertama citra diri polisi terhadap dirinya sendiri dan

⁷ Aris Santoso. 2014. *Hoegeng Oase di Tengah Keringnya Penegakan Hukum*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka. Hal 5

⁸ Nur Hidayanti, dkk. 2021. *Jenderal Hoegeng Iman Santoso: Kapolri Jujur, Disiplin, dan Sederhana Sebagai Teladan Generasi Muda*. Jurnal Swadesi. Volume II, No.1. Hal 11

kedua citra sosial polisi yang sesuai dengan tugas dan hakikatnya ditengah masyarakat Indonesia⁹.

Untuk mewujudkan citra polisi yang baik Hoegeng berusaha menjadi sosok pemimpin yang jujur, adil, dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Sikap tersebut dapat terlihat pada strategi kebijakannya pada saat memimpin Polri yaitu dengan memiliki sikap keterbukaan dan menjalin hubungan yang baik dengan pers agar dapat memberikan berita yang transparan terkait dengan agenda-agenda Polri. Hal tersebut Hoegeng lakukan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Polri. Selain itu, sebagai seorang pemimpin Hoegeng tidak pernah merasa malu turun tangan mengambilalih tugas teknis seorang agen polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak ditempat. Misalnya jika disuatu prapatan jalan terjadi kemacetan lalu lintas maka dengan baju dinas Kapolri Hoegeng akan menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi lalu lintas. Hal tersebut Hoegeng lakukan agar dapat menjadi contoh teladan tentang motivasi serta kecintaan polisi akan tugasnya, sekaligus memberikan teguran dan peringatan kepada bawahan yang lalai¹⁰. Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang pemimpin Hoegeng ingin menunjukkan kesan bahwa kepolisian sadar akan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.

⁹ Abrar Yusra dan Ramadhan KH. 1993. *Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan*. Jakarta: PT Sinar Harapan. Hal 310

¹⁰ Bonaventura. 2014. *Jenderal Hoegeng Iman Santoso Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma. Hal 6

Sikap kepemimpinan Jenderal Hoegeng juga terlihat pada saat menangani beberapa kasus besar. Seperti kasus penyelundupan mobil-mobil mewah oleh Robby Tjahyadi dan kasus pemerkosaan Sum Kuning. Pada kedua kasus tersebut banyak sekali pejabat-pejabat tinggi yang terlibat. Sebagai seorang pemimpin Hoegeng tidak ingin menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, sebagai seorang Polisi Hoegeng berusaha menangkap setiap pelaku kejahatan yang dinilai bersalah tanpa pandang bulu¹¹. Hal tersebut adalah wujud dari keinginannya dalam menciptakan citra polisi yang baik dalam dirinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ditengah terjadinya krisis moral dan kepercayaan kepada Polri Jenderal Hoegeng dalam kepolisian Indonesia ada sebagai sosok pemimpin yang patut diteladani baik bagi generasi muda sekarang maupun bagi kalangan anggota Polri. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik membahas masalah diatas dengan Judul **“Kepemimpinan Jenderal Hoegeng Iman Santoso Sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah Kepemimpinan Jenderal Hoegeng Iman Santoso Sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971, maka dapat dikaji kedalam tiga permasalahan berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Jenderal Hoegeng Iman Santoso Sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971?

¹¹ Asvi Warman Adam. 2015. *Penegakan Etika dan Hukum Sebelum Orde Baru*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Hal 151-152

2. Bagaimana implementasi kebijakan Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971?
3. Bagaimana dampak kebijakan Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pemikiran Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971.
2. Mengetahui implementasi kebijakan Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971.
3. Mengetahui dampak kebijakan Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam hal waktu, tempat dan tema. Mengingat cakupan permasalahan dalam penelitian ini sangat luas, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada satu titik permasalahan, sehingga bisa menjawab berbagai permasalahan secara lebih mendasar.

Ruang lingkup batasan tematik penelitian ilmu sejarah ini membahas tentang pola kepemimpinan Jenderal Hoegeng saat menjabat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Ruang lingkup batasan temporal dalam kajian penelitian ini dimulai pada tahun 1968 ketika Jenderal Hoegeng Iman Santoso diangkat menjadi Kapolri

dan berakhir pada tahun 1971 ketika Jenderal Hoegeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri.

Ruang lingkup batasan spasial pada penelitian ini adalah pulau Jawa, dimana pada saat itu kasus-kasus besar yang ditangani oleh Jenderal terdapat di pulau Jawa khususnya Jakarta dan Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

A. Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah penulisan ini diharapkan bisa menambah khasanah ilmu sejarah dan sumbangan ilmiah pada ilmu sejarah. Khususnya pada kajian mengenai Kepemimpinan Jenderal Hoegeng saat menjabat sebagai Kapolri.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi para pembaca agar lebih mengenal kepemimpinan Jenderal Hoegeng saat menjabat sebagai Kapolri.

2. Bagi Penulis

Sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam menulis, menganalisis, merekonstruksi dan menyajikan suatu peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah, penulisan proposal ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi penulis.

3. Bagi Universitas Jambi

Karya ilmiah ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang bisa digunakan sebagai referensi penelitian khususnya tentang kepemimpinan Jenderal Hoegeng saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968-1971.

4. Bagi Program Studi Pendidikan Sejarah

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi yang berhubungan dengan penelitian tentang sejarah tokoh pemikiran, dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti sejenis.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada penulisan karya ini, peneliti menggunakan referensi baik dari buku, tesis, jurnal maupun internet yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan tentang masalah yang akan dikaji, diantaranya yaitu:

Pertama yaitu, skripsi yang ditulis oleh Muchamad Dzulham Fadli pada tahun 2014, dengan judul “*Hoegeng Iman Santoso: Dari Polisi Sampai Oposisi (1945-1980)*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu membahas tentang perjalanan hidup Jenderal Hoegeng selama ia meniti karier dalam dunia Kepolisian. Sudah begitu banyak sepak terjang yang Hoegeng dapatkan selama menjabat. Tidak hanya menjadi seorang Polisi, Hoegeng juga menduduki beberapa jabatan penting diluar dunia Kepolisian. Hoegeng pernah menjabat pada tahun 1965 sebagai Menteri Iuran Negara. Selain itu Hoegeng juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet pada tahun 1966 dan sampai pada akhirnya dipercayai untuk memegang jabatan sebagai Kapolri pada tahun 1968.

Hoengeng mulai bergabung dalam kelompok Petisi 50 pada tahun 1980. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas karier Jenderal Hoengeng sebagai seorang Polisi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian lebih difokuskan dalam pembahasan tentang bagaimana kepemimpinan Jenderal Hoengeng selama menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1968-1971.

Kedua yaitu, skripsi yang ditulis oleh Anisa Humam pada tahun 2015 dari Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Skripsi “*Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kepemimpinan Jenderal Hoengeng Iman Santoso dan Relevansinya Dengan Kompetensi Leadership Guru Pendidikan Agama Islam*”. Dapat diketahui hasil penulisan skripsi ini adalah nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh Jenderal Hoengeng Iman Santoso memiliki relevansi dengan kompetensi leadership pada guru Pendidikan agama Islam. Jenderal Hoengeng Iman Santoso adalah seorang Kapolri yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sebagai Pemimpin Hoengeng memiliki karakter yaitu disiplin, tegas, jujur, berwibawa dan peduli sesama. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas sosok pemimpin dalam tubuh Kapolri. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana kepemimpinan Jenderal Hoengeng selama menjabat sebagai Kapolri.

Ketiga yaitu, jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayanti pada tahun 2021 dengan judul “*Jenderal Hoengeng Iman Santoso: Kapolri Jujur, Disiplin, dan Sederhana Sebagai Teladan Generasi Muda*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan karakter sangat penting untuk mewujudkan

sumber daya manusia yang berkualitas. Pada masa sekarang Pendidikan karakter Indonesia begitu memprihatinkan. Banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi karena krisisnya moral. Untuk mengembalikan nilai-nilai karakter pada generasi muda salah satunya adalah meneladani nilai-nilai karakter pada tokoh-tokoh nasional yang pernah ada seperti Jenderal Hoegeng. Dalam penelitian terdapat persamaan yaitu membahas sosok Jenderal Hoegeng sebagai Kapolri. Akan tetapi, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang bagaimana kepemimpinan Jenderal Hoegeng selama menjabat sebagai Kapolri.

1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Jenderal Hoegeng Iman Santoso Sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971”. Dengan demikian, penelitian ini dapat dilihat melalui kerangka konseptual teori sosial interasionisme simbolik dari perspektif Erving Goffman.

Erving Goffman menjelaskan bahwa kehidupan sosial mirip dengan pertunjukan diatas panggung seperti drama teater. Ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain, ada pesan yang ia kelola dan diharapkan tumbuh pada orang lain. Oleh karena itu, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain¹².

Stoner James menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan mempengaruhi tindakan seseorang atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan

¹² Bagong Suyanto, dan Khusna Amal. 2010. *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing. Hal 172

disini lebih menekankan perwujudan dari tokoh Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat sebagai Kapolri¹³.

Polisi merupakan salah satu alat negara yang tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, profesionalisme polisi dalam menjalankan tugasnya sangat dibutuhkan. Apalagi tingginya tingkat kriminilitas yang terjadi di masyarakat sekarang juga dilakukan oleh oknum anggota Polri. Salah satu cara untuk mengembalikan nilai dan moral pada setiap jiwa anggota Polri pada saat ini adalah meneladani sikap pemimpin yang ideal pada tubuh anggota Polri, yaitu sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso.

Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang merupakan sosok teladan dalam sejarah kepolisian Indonesia sangat menjunjung tinggi makna profesionalitas dalam kinerjanya sebagai Kapolri, kebijakan-kebijakan yang diterapkannya selama menjabat tidak terlepas dari karakter yang sudah dimilikinya sejak lahir, yaitu jujur¹⁴, adil, sederhana, dan disiplin. Sehingga tugas dan fungsi yang diembannya sebagai Polri tidak melenceng dari ketentuan hukum dan bisa menggapai cita-cita bangsa yaitu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pada saat Hoegeng menjadi Kapolri, Indonesia sedang dalam masa transisi dari orde lama menuju ke orde baru, dimana pusat perhatian pemerintahan adalah pembangunan ekonomi, dan tugas kepolisian pada saat itu amat

¹³ A.F. Stoner James, dkk. 1996. *Manajemen*. Edisi Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo. Hal 161

¹⁴ Jujur adalah ketika seseorang mengatakan hal yang sebenarnya sesuai dengan peristiwa yang terjadi dilapangan. Jujur adalah sikap yang bersesuaian antara ucapan dengan perbuatan, dan informasi dengan kenyataan.

diperlukan untuk menunjang stabilitas politik. Pada pengembalian fungsi polisi pada saat itu, menurut Hoegeng langkah awal yang harus dilakukan adalah mendapatkan tempat dihati masyarakat dengan memiliki sikap yang terbuka dalam kehidupan nasional dan kemasyarakatan. Hoegeng ingin menunjukkan kesan bahwa kepolisian sadar akan tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk memelihara ketertiban dan keamanan¹⁵.

Lebih lanjut lagi, pada saat memimpin sebagai Kapolri, Hoegeng memiliki kebijakan atau strategi yang dapat memperbaiki kinerja kepolisian agar lebih baik. Salah satunya adalah perubahan nama istilah kepolisian yang sebelumnya disebut dengan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dikenal sampai sekarang. Selain itu demi mewujudkan cita-citanya sebagai polisi yang jujur dan anti korupsi, Hoegeng berusaha membangun hubungan yang baik dengan kalangan Pers. Hoegeng berusaha untuk selalu bersikap terbuka dengan kalangan pers, karena menurutnya hal tersebut sangat membantu instansi Polri memiliki citra yang baik di mata masyarakat¹⁶.

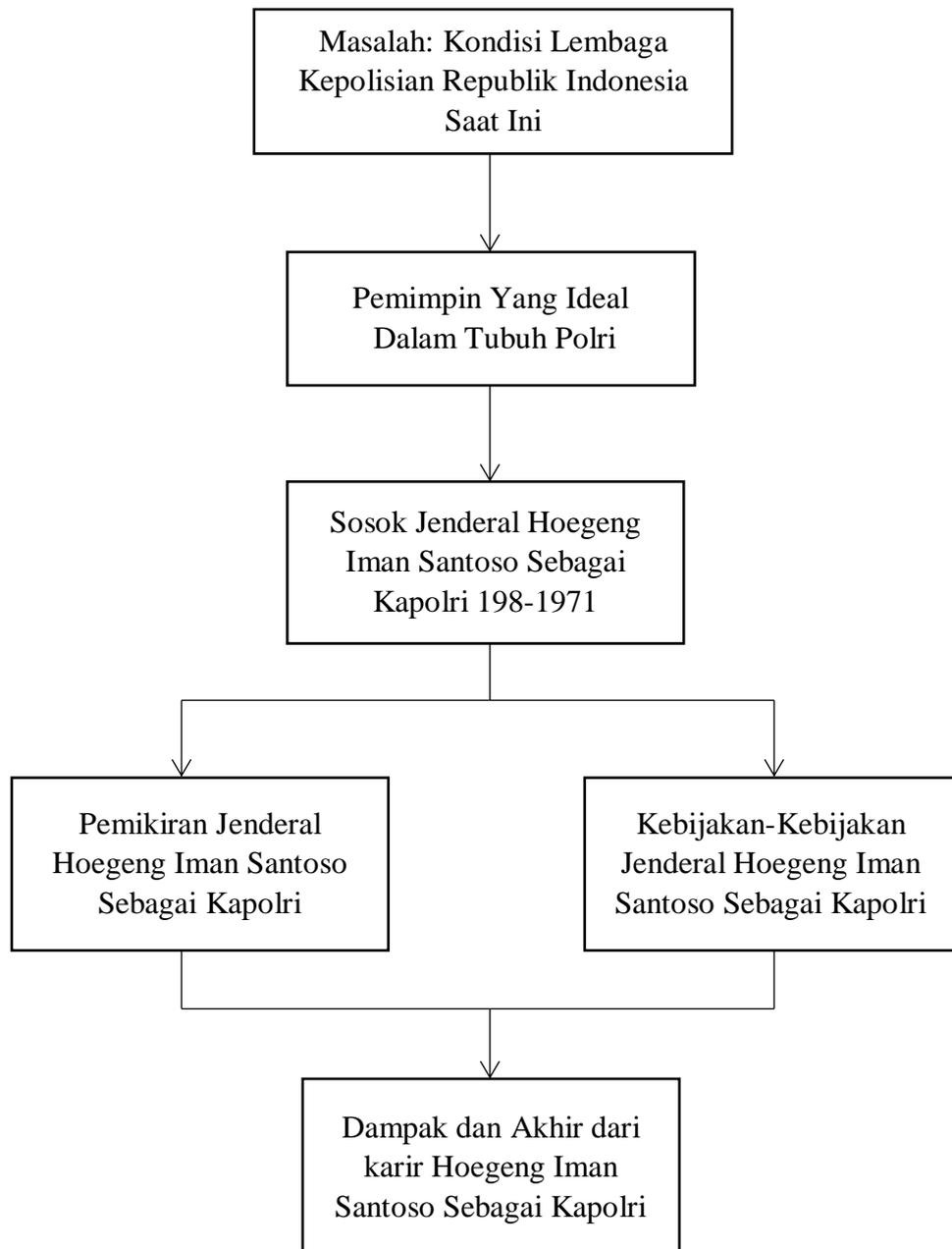
Namun, pada tahun ketiga Jenderal Hoegeng menjabat sebagai Kapolri, tiba-tiba turun surat perintah dari Menhankam yang isinya adalah penunjukan Hoegeng menjadi Duta Besar disalah satu negara Eropa Barat, yaitu Kerajaan Belgia. Hoegeng memilih menolak perintah tersebut karena tidak ingin meninggalkan Indonesia dan tidak memiliki ilmu dalam dunia politik.

¹⁵ Abrar Yusra, dan Ramadhan KH. 1993. *Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan*. Jakarta: PT Sinar Harapan. Hal 306-309

¹⁶ Bonaventura. 2014. *Jenderal Hoegeng Iman Santoso Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971*. Skripsi. Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. Hal 51-56

Penolakan tersebut berujung pada pemecatan Jenderal Hoengeng sebagai Kapolri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan dengan kerangka konseptual yang memudahkan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual

1.8 Metode Penelitian

Penelitian sejarah merupakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkap peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Wiersman dalam Djamal (2015:103), yang berpendapat bahwa penelitian sejarah adalah suatu proses menelaah secara kritis suatu peristiwa pada masa lampau dengan tujuan menghasilkan gambaran dan interpretasi yang tepat dan memadai tentang peristiwa tersebut. Dalam rangka penelitian terhadap kepemimpinan Jenderal Hoeng Iman Santoso sebagai Kapolri. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama dalam penelitian sejarah, dimana pada tahap ini peneliti akan mencari dan menemukan sumber sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti¹⁷. Sumber atau data yang peneliti cari mengenai kepemimpinan Jenderal Hoeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971. Peneliti mendapatkan sumber primer dan sumber sekunder melalui studi kepustakaan. Berikut temuan sumber dan data penelitian mengenai kepemimpinan Jenderal Hoeng sebagai Kapolri tahun 1968-1971, antara lain:

¹⁷ Joko. *Langkah-langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital*. Jurnal Sejarah dan Budaya. Volume 15. No.2 Desember 2021. Hal 31

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan para saksi mata yang benar-benar yang menyaksikan dan mengalami peristiwa sejarah tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber primer wawancara dengan anak kedua Jenderal Hoegeng yaitu Aditya Soetanto yang dilakukan oleh tim Trans 7 dalam acara Mata Nadjwa yang dilansir dalam laman [youtube.com/narasiroom](https://www.youtube.com/narasiroom) dan sebuah buku Autobiografi karya Abrar Yusra dan Ramadhan KH yang berjudul “Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan”.

a. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang dihasilkan dari rekonstruksi sejarah oleh sejarawan yang berbentuk sebuah karya atau tulisan mengenai tokoh Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Berikut sumber sekunder yang ditemukan , antara lain:

1. Aris Santoso. 2014. *Hoegeng Oase di Tengah Keringnya Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka
2. Aris Santoso dan Ery Sutrisno. 2004 *Pak Hoegeng Polisi Profesional dan Bermartabat*, Jakarta: Adrianus Noe Center
3. Suhartono. 2013. *Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan*, Jakarta: PT Media Nusantara.
4. Dr. M. Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Kemitraan, Jakarta Selatan
5. Kunanto. 1997 *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan keaslian dan kredibilitas sumber¹⁸. Adapun caranya, yaitu dengan melakukan kritik dan penilaian. Penilaian sumber sangat diperlukan untuk mencari tau apakah data yang ada pada sumber tersebut dapat dipertanggung jawabkan isinya. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Pada penelitian ini penulis melakukan kritik eksternal dengan melakukan penilaian fisik terhadap suatu sumber agar mendapatkan otentitas atau keaslian suatu sumber. Sedangkan untuk kritik intern, penulis menyelidiki dan mencari tau isi dari suatu sumber dengan tujuan untuk menguji kredibilitas dan reabilitas dari suatu sumber tersebut. Agar penulis dapat mengetahui apakah suatu sumber tersebut dapat dipercaya dan tidak dimanipulasi, sehingga fakta-fakta dari suatu sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan ketiga pada penelitian sejarah¹⁹. Pada tahap ini peneliti menganalisis dan membandingkan sumber satu dengan sumber-sumber sejarah lain yang telah diuji kebenarannya melalui kritik sumber. Peneliti berusaha memberikan penafsiran terhadap sumber atau data-data yang telah diperoleh untuk menemukan pandangan dari fakta-

¹⁸ Suhartono W, dan Pranoto. 2014. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 35

¹⁹ Wulan Juliana S. *Metode Penelitian Sejarah*. Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran. Volume 1. No.2. April 2021. Hal 3

fakta mengenai kepemimpinan Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971.

4. Historiografi

Pada tahap historiografi ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian sejarah untuk menulis dan menyusun kembali peristiwa sejarah mengenai kepemimpinan Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia²⁰. Penulis berusaha menulis kembali melalui sebuah karya skripsi dalam pembahasan mengenai “Kepemimpinan Jenderal Hoegeng Iman Santoso Sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 1968-1971”.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi: bagian depan, bagian isi dan bagian penutup. Bagian depan berisikan dari halaman judul penelitian, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan lampiran. Kemudian bagian isi yaitu berisikan dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁰ Herlina. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika. Hal 30

- BAB II : Berisikan tentang pemikiran Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968-1971.
- BAB III : Berisikan tentang implementasi kebijakan Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968-1971.
- BAB IV : Berisikan tentang dampak kebijakan Jenderal Hoegeng Iman Santoso saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968-1971.
- BAB V : Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang terkait dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya.